PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117
Telepon 081 9494 0000 1
Pos-el dishub@kaltimprov.go.id; Laman dishub.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 000.8.3.2/54/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang:

a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan standar waktu merespons dan memenuhi permohonan informasi publik yang lebih cepat daripada jangka waktu minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk menjamin kepatuhan pelaksana layanan terhadap standar sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur ketentuan sanksi internal atas permohonan informasi publik maupun pernyataan keberatan yang tidak ditanggapi sesuai batas waktu yang ditetapkan;

d. bahwa selain pengenaan sanksi, peningkatan mutu pelayanan informasi publik perlu didorong melalui pemberian penghargaan kepada pelaksana layanan informasi publik yang berkinerja baik berdasarkan standar penilaian yang terukur;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Menetapkan Standar Layanan Informasi Publik sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID Pembantu, dan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik.

KEDUA : Setiap permohonan informasi publik yang diterima, baik melalui meja layanan, surat, pos-el, layanan pesan singkat, maupun formulir daring pada laman resmi Dinas, wajib direspons paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima, dengan ketentuan:

a. permohonan dicatat dalam buku register permohonan informasi publik pada hari yang sama;

b. pemohon menerima pemberitahuan bahwa permohonannya telah diterima beserta nomor pendaftaran yang dapat digunakan untuk memantau proses layanan; dan

c. dalam hal berkas permohonan belum lengkap, pemohon diberikan surat keterangan permohonan informasi belum lengkap disertai rincian kekurangannya.

KETIGA : Permohonan informasi publik wajib dipenuhi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap, lebih cepat daripada jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KEEMPAT : Dalam hal informasi yang dimohon berjumlah besar, berada pada lebih dari satu unit pengolah, atau memerlukan uji konsekuensi terlebih dahulu, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan disertai alasan tertulis kepada pemohon.

KELIMA : Pernyataan keberatan yang disampaikan pemohon kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib dicatat dalam buku register keberatan pada hari diterimanya keberatan dan ditanggapi secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan dicatat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEENAM : Pelaksana layanan informasi publik yang mengabaikan atau tidak menanggapi permohonan informasi publik sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dikenakan sanksi internal secara bertahap, tanpa mengurangi ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, berupa:

a. teguran lisan oleh atasan langsung;
b. teguran tertulis apabila keterlambatan terulang; dan
c. pencatatan dalam penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan.

KETUJUH : Ketentuan sanksi internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berlaku pula bagi pelaksana layanan yang mengabaikan atau tidak menanggapi pernyataan keberatan pemohon informasi publik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KEDELAPAN : Kepala Dinas memberikan penghargaan kepada pelaksana layanan informasi publik yang berkinerja baik dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik, berupa piagam penghargaan yang ditandatangani Kepala Dinas, prioritas dalam pengembangan kompetensi dan pendidikan serta pelatihan, pencatatan capaian dalam penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan, dan/atau insentif sesuai kemampuan keuangan daerah.

KESEMBILAN : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dinilai paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas, dan diumumkan melalui laman resmi Dinas, dengan standar penilaian sebagai berikut:

a. ketepatan waktu merespons permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
b. ketepatan waktu memenuhi permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, termasuk permohonan yang dilimpahkan kepada unit kerjanya;
c. ketertiban dan kelengkapan pencatatan permohonan informasi publik serta pernyataan keberatan dalam buku register;
d. ketertiban pemutakhiran Daftar Informasi Publik serta penyediaan dan pengumuman informasi publik pada laman resmi Dinas; dan
e. nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan informasi publik berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESEPULUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Keputusan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta mengumumkan ringkasan kinerja layanan informasi publik kepada masyarakat melalui laman resmi Dinas.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Agustus 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



Yusliando, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196710051998031008

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selaku PPID Utama;
4. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur selaku Atasan PPID.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).